

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Soeharto atau yang dikenal dengan masa Orde Baru kebebasan berpolitik sangatlah dibatasi. Senada dengan yang dikatakan oleh Winarno (2007, hlm. 58) bahwa pada masa Orde Baru, partai politik tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dalam sistem politik demokrasi. Kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam memperlihatkan sifat mendua. Toleransi hanya diberikan kepada umat muslim yang tidak mengembangkan aspirasi politik dan upaya sistematis dengan melakukan penyingkiran orang-orang Masyumi yang merupakan “kaum modernis” atau “reformis islam”. Orde Baru saat itu telah melakukan depolitisasi umat Islam khususnya dan kelompok masyarakat politik lainnya, yang dianggap masih melakukan perjuangan politik berbasis politik aliran (Abdul Syukur, dkk., 2012, hlm.405).

Tak hanya itu, di penghujung kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi. Habibie (2006, hlm. 3) mengemukakan bahwa krisis moneter merontokkan sendi-sendi perekonomian nasional yang berujung pada krisis ekonomi. Banyak perusahaan nasional gulung tikar sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Pemerintah bahkan terpaksa menutup 16 bank yang dinyatakan tidak sehat dan tidak mungkin diselamatkan. Menurut Ali Safa'at (2011, hlm. 229) masalah krisis ekonomi memicu keresahan masyarakat karena menurunnya daya beli bersamaan dengan meningkatnya harga barang dan kebutuhan pokok yang juga mengalami kelangkaan. Kondisi ini melahirkan krisis sosial yang meluas dan menyentuh semua sendi kehidupan bangsa, termasuk politik.

Effendi Yusuf dan Basalim (2000, hlm.41-42) menjelaskan bahwa pemerintah mengalami krisis kepercayaan masyarakat sehingga semakin

memperkuat tuntutan untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Pemerintah yang sedang berkuasa dipandang tidak mampu mengatasi krisis nasional. Saat itu pemerintah juga dipandang penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kondisi krisis nasional tersebut membuat masyarakat akhirnya tidak tinggal diam. Kondisi tersebut merupakan momentum terjadinya perubahan dan tuntutan keterbukaan dan demokratisasi di penghujung Orde Baru. M.C Ricklefs (2010) menggambarkan situasi tuntutan akan reformasi terus meningkat seiring semakin memburuknya krisis ekonomi dan semakin jelas bahwa rezim tidak mampu mereformasikan diri. Amien Rais dari Muhammadiyah merupakan salah satu penggerak paling menonjol pada tahap ini. Demonstrasi mahasiswa semakin marak. Dijelaskan pula oleh Ali Safa'at (2011) demonstrasi yang dipelopori mahasiswa terjadi dengan intensitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia dengan massa yang besar (hlm.230). Pada awal Mei, mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan di kota besar. Kerusuhan besar terjadi di Medan. Pada tanggal 12 Mei, penembak jitu ABRI menembak mati empat mahasiswa demonstran di Universitas Trisakti Jakarta. Pada saat itu, tokoh-tokoh penting militer termasuk Jenderal Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa rezim Soeharto tak bisa dipertahankan lebih lama lagi (hlm.689).

Demonstrasi mahasiswa yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto semakin menguat. Mulai 18 Mei 1998, gedung DPR/MPR diduduki oleh ribuan mahasiswa. Pada hari tersebut, pimpinan MPR juga mengeluarkan pernyataan meminta pengunduran diri Soeharto (Yusuf dan Basalim, 2000, hlm.44). Akhirnya Presiden Soeharto mengumumkan pernyataan berhenti sebagai Presiden pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J Habibie, sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945, menjadi presiden menggantikan Soeharto. Berhentinya Presiden Soeharto membuka kesempatan dilakukannya reformasi menuju demokrasi di Indonesia (Arinanto, 2003, hlm.248). Maka dari itu, mulailah terbukanya keran demokrasi di Indonesia.

Reformasi 1998 membawa perubahan yang nyata dalam sistem politik di Indonesia. Era reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari bangku kekuasaannya dan digantikan oleh B.J Habibie. Dengan adanya reformasi ini membawa angin segar bagi politik Indonesia. Ricklef (2010, hlm. 693) mengatakan bahwa Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Setelah 32 tahun Indonesia dipimpin oleh kepemimpinan Soeharto yang otoriter dan mensejajarkan islam politik dengan komunis sehingga melahirkan stigma sosial bahwa islam politik adalah ekstrimis kanan dan berbagai upaya nya yang memarginalisasi islam politik, para aktivis islam politik kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menyuarakan gagasan dan pandangan mereka.

Lengsernya Soeharto melicinkan jalan bagi kebebasan politik, dimana pada saat itu partai-partai politik didirikan sesuai dengan representasi pandangan politik masyarakat sehingga menghasilkan 200 partai politik. Namun hanya 48 partai politik yang berhak mengikuti pemilu 1998. Multi partai tersebut memunculkan banyak partai politik baik yang berbasis nasionalis maupun agama. Periode pasca Soeharto menuntut para pegiat dakwah untuk semakin intens memperjuangkan cita-cita Islam. Maka dari itu, dapat dikatakan pada saat itu ialah waktunya untuk melakukan dakwah melalui partai politik.

Salah satu partai yang berbasis agama yang lahir pada tanggal 20 Juli 1998 adalah PK (Partai Keadilan) yang kemudian berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada 20 April 2002. Berdirinya PK Sejahtera tidak dapat dilepaskan dari gerakan dakwah kampus yang disebut Jamaah Tarbiyah. Didirikan pada akhir 1970-an, Jamaah Tarbiyah adalah jejaring longgar gerakan dakwah mahasiswa di universitas-universitas sekuler dimana para aktivisnya terinspirasi pemikiran dan model gerakan Ikhwanul Muslimin, Mesir (Muhtadi, 2012, hlm.254). Model gerakan Ikhwanul Muslimin tersebut menggunakan pola *Usrah* yang cukup terkenal pada masa itu, dalam pola ini para mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan

10-20 orang. Penggunaan pola ini dipelopori oleh Ir. Imaduddin Abdul Rahim atau yang terkenal dengan sapaan Bang Imad. Pola ini berkembang dari masjid Salman ITB. Ketika itu sekitar awal 1970an Bang Imad menjabat sebagai ketua umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI), sebuah lembaga otonom yang berada di bawah naungan organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), mencoba mengagas sebuah konsep pengkajian Islam yang sistematis dan terarah. Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum LDMI, beliau juga terpilih sebagai Sekjend. IIFSO (*International Islamic Federation of Student Organization*). Dari sinilah ia mulai banyak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran gerakan Islam internasional yang akhirnya membuat beliau tertarik dengan pemikiran yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin yang ketika itu pengaruhnya kuat di berbagai penjuru dunia, karena interaksi yang cukup intens dengan aktifis gerakan tersebut dalam forum IIFSO (Aziz,dkk,1996, hlm.217). Kegiatan pengkajian Islam yang dilakukan para mahasiswa Masjid Salman ITB inilah yang kemudian menjadi contoh bagi berbagai kegiatan keislaman para mahasiswa di universitas-universitas lain di Indonesia seperti UGM, UI, IPB, UNUD, dan lainnya (Damanik, 2002, hlm.71).

Pada tahun 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Kebijakan ini membuat para tokoh Islamis menjadi berang. Di saat yang sama para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam. Damanik (2002) mengungkapkan bahwa LDK merupakan organisasi resmi yang berawal dari perkumpulan pengkajian Islam di universitas-universitas Indonesia. Lebih lanjut Muhtadi (2012) menuturkan bahwa FSI adalah nama samaran dari dakwah kampus yang berdiri di hampir semua fakultas di Universitas Indonesia (UI). Ketika FSI berkembang pesat dan mendapat sambutan hangat serta dukungan luas dari mahasiswa,

kebutuhan atas dibentuknya wadah seperti LDK yang lebih terorganisir untuk memperluas aktivitas Islam menjadi sangat urgent (hlm. 40).

Tak lama setelah didirikan, LDK menjalin jejaring dengan berbagai lembaga gerakan dakwah di kampus-kampus universitas lain, seperti kampus-kampus besar di Jawa dan Sumatera. Jejaring aktivis LDK antar kampus tersebut kemudian semakin memperluas wadah dakwah kemudian dibentuklah FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) pada 1986. FSLDK adalah forum koordinasi para aktivis dakwah di berbagai kampus di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membangun jejaring dakwah yang lebih luas dan terorganisir (Muhtadi, 2012, hlm.43). Momentum pertemuan tahunan ke 10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan para aktivis LDK untuk mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi KAMMI inilah yang nantinya mempertimbangkan didirikannya sebuah partai politik berbasis Islam yang menginginkan reformasi di bidang politik. Partai tersebut kemudian dinamakan PK (Partai Keadilan) yang pada tahun 2002 resmi berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Didirikan oleh sekumpulan anak muda yang giat mengadakan pengajian di masjid-masjid kampus, partai ini kemudian tampil menjadi kekuatan politik yang mulai diperhitungkan (Umarama, 2009, hlm.2). Waluyo (dalam Aminuddin, 2010, hlm.129) mengatakan keterbukaan keran demokrasi merupakan titik tolak jama'ah tarbiyah yang berawal dari gerakan keagamaan bertransformasi menjadi partai politik yang berasaskan Islam, yaitu PKS.

Indonesia merupakan negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat maka dari itu proses pemilihan umum sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang menjunjung nilai demokrasi. Pemilu dilaksanakan untuk melibatkan rakyat dalam pemerintahan. Pemilu pertama kali dilaksanakan secara nasional pada tahun 1955. Menurut Wanandi (2014) pemilu 1955 dianggap jujur dan adil, di mana 28 partai mendapatkan kursi di Parlemen. Adapun Pemilu 1955 kurang memadai karena kondisi negara yang

masih berantakan setelah Perang Dunia II dan lima tahun revolusi kemerdekaan membawa kesengsaraan kepada rakyat (hlm.128).

Poerwantana (1994) menjelaskan pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tanggal 2 Mei 1971. Berbeda dengan pemilu 1955 yang menggunakan sistem proporsional, pemilu 1971 menggunakan sistem tak langsung (hlm.78). Selain itu, pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai. Kecuali Golkar, yang lainnya sudah punya pengalaman ikut dalam Pemilu 1955, dan hasilnya Golkar menang hampir 63 persen dari perolehan suara dan 236 dari 360 kursi DPR (Wanandi, 2014, hlm.129-130).

Pemilu kedua pada masa Orde Baru yaitu Pemilu 1977, yang diikuti oleh tiga partai. Seperti yang dijelaskan oleh Poesponegoro dan Notosusanto (1984) bahwa salah satu usaha pembangunan politik dalam masa pemerintahan Orde Baru adalah dengan jalan mengadakan penyederhanaan kepartaian. Sehingga peserta dalam pemilu 1977 tinggal 3 organisasi yang terdiri dari 2 golongan politik dan 1 golongan karya (hlm.517). Pemilu ini didominasi oleh Golkar yang mendapatkan 62, 1% suara, sementara PDI mendapat 8,6%. Karena adanya NU, PPP mendapatkan 29,3%. Maka, Golkar merebut mayoritas kursi DPR, dan tentunya memegang kendali atas anggota - anggota yang diangkat pemerintah dan atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Ricklefs, 2010, hlm.627).

Pemilihan umum 1982 dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Pemilihan umum 1982, landasan hukumnya adalah Undang-undang No.2 tahun 1980 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana dalam undang-undang sebelumnya, sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem pemilihan proposional (Amiruddin, 2015, hlm.14). Dilansir dari *web* resmi Komisi Pemilihan Umum, hasil pemilu 1982 kembali menempatkan Golkar sebagai pemenang dengan persentase 68,34%.

Sementara itu peralihan pendukung NU dari PPP ke Golkar tampak jelas dalam hasil pemilu April 1987. Perolehan Golkar menanjak menjadi 73,2%,

sementara PPP merosot dari 27,8% menjadi 16%. PDI meningkat perolehannya dari 7,9% pada pemilu 1982 menjadi 10,9%. Jadi 11,9% suara telah meninggalkan PPP, 8,9% beralih ke Golkar dan sisanya ke PDI (Ricklefs, 2010, hlm.630).

Pada pemilu 1992 Soeharto bertekad mengubah penurunan jumlah suara Golkar. Hasil perolehan suara dalam pemilu 1992 yang dicapai PDI adalah 14,9% dan turun menjadi 3% di pemilu 1997. Suara yang pindah dari PDI tersebar merata antara PPP, yang mendapat 5,5% menjadi 22,5% dan Golkar yang mendapat 6,4% menjadi 74,5%. Ini merupakan persentase jumlah suara tertinggi yang pernah dicapai Golkar, dan ironisnya ini terjadi di masa-masa terjadinya keruntuhan rezim (Ricklefs, 2010, hlm.687). Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, maka rakyat Indonesia seolah menyambut pesta demokrasi yang ditandai ikut sertanya partai politik baru dalam panggung pemilihan umum, salah satunya yaitu PK.

Pemilihan umum 1999 merupakan pemilihan umum yang terjadi pada masa transisi dari sebuah pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum 1999 juga merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam upaya penataan kembali kehidupan politik yang lebih sehat, adil dan demokratis jika dibandingkan dengan pemilihan umum-pemilihan umum sebelumnya (Haris, 2000, hlm.31).

Untuk pertama kalinya PK mengikuti pemilihan umum legislatif pada tahun 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, memang hanya 48 partai politik yang dinyatakan berhak mengikuti ritual pesta demokrasi, Pemilu 1999. Di antara keempat puluh delapan partai politik peserta Pemilu 1999, terdapat Partai Keadilan (PK) yang merupakan salah satu partai politik berasaskan Islam (Umarama, 2009, hlm. 1). Dalam pemilu tersebut, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kegagalan PK tersebut untuk memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum yakni sebesar 2% maka menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti

nama dan pada akhirnya PK berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Pada pemilu legislatif 2004, PKS mengalami kemajuan. PKS berhasil meraih 7,34% suara dan mendapatkan 45 dari 550 kursi DPR yang diperebutkan. Sebuah pencapaian yang luar biasa dibanding saat pemilu 1999 ketika masih menyandang nama PK yang hanya memperoleh suara 1,3%. Suwarno (2012, hlm. 114) mengatakan bahwa perolehan suara PKS pada pemilu 2004 jauh lebih baik daripada pemilu pertama era reformasi 1999 dan menjadi kekuatan baru politik di Indonesia yang sudah diperhitungkan keberadaannya. Dalam pemilu berikutnya tahun 2009, PKS kembali naik dalam perolehan suaranya meskipun tidak terlalu signifikan. PKS memperoleh suara 7,88% suara atau 57 kursi di parlemen dan menduduki peringkat empat dalam perolehan suara secara nasional. Sedangkan di pemilu tahun 2014, PKS harus kehilangan sedikit suara dengan memperoleh 8.480.204 suara atau 6,79% (Hanta Yuda, 2010, hlm. 127).

Peranan PK Sejahtera dalam lembaga legislatif DPR perlu dikaji secara mendalam karena telah banyak perwakilan PK Sejahtera yang duduk di kursi DPR. Maksudi (2012, hlm.169) mengemukakan bahwa “DPR adalah suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. Karena itu dalam analisis sistem, kita dapat memasukan lembaga legislatif ini sebagai struktur yang berada dalam proses konversi. Sehingga terlihat bahwa fungsi utamanya adalah pembuatan undang-undang. Namun pada akhirnya fungsi dan peranan lembaga ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif”. Namun dalam sisi lain Waluyo (2005, hlm.43) berpendapat bahwa kebanyakan wakil rakyat lupa dengan tugas utama mereka untuk “merumuskan aturan dan kebijakan” (*rule and policy making*) agar sejalan dengan “kepentingan umum” (*public interest*). Tugas utama anggota parlemen sering disederhanakan menjadi legislasi (pembuatan aturan), *budgeting* (penyusunan anggaran negara/daerah), dan *controlling*



(pengawasan jalannya pemerintahan). Disamping tugas utama itu, ada lagi hak anggota dewan untuk meminta keterangan pemerintah (interpelasi), melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran (angket), dan menyeleksi pejabat publik yang dipromosikan pihak eksekutif. Pun dalam situs resmi PK Sejahtera disebutkan bahwa legislator PK Sejahtera berupaya untuk mendekatkan DPR ke masyarakat. Melalui DPR, aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak.

Pada faktanya dalam bidang politik, PK Sejahtera sedikit banyak telah berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara, mengingat lembaga legislatif merupakan representasi dari masyarakat secara umum karena keberadaan mereka yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum, maka legislatif membuat kebijakan dalam bentuk peraturan yang seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak. Selain itu juga mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat ialah cita-cita yang disuarakan oleh PK Sejahtera. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (2008) menyebutkan bahwa PK Sejahtera memandang bahwa penyelenggaraan lembaga negara yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya menjadi suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik (hlm. 241). Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang di citakan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai tauhid sebagai landasan tata kehidupan mereka dan menjalankan politik keadilan serta menegakkan keadilan politik bagi masyarakat dengan moralitas yang bersih, peduli, dan profesional.

Kajian mengenai PK Sejahtera dirasa menarik untuk diteliti mengingat partai ini merupakan fenomena politik nasional Indonesia. Kelahiran PK Sejahtera bermula dari perkumpulan para aktivis Islam ataupun gerakan sosial yang tergabung dalam Jamaah Tarbiyah di berbagai kampus di Indonesia yang merasa gerah dengan kondisi politik maupun ekonomi pada saat rezim

Soeharto. Perkembangan PK Sejahtera pun yang bermula dari PK (Partai Keadilan) pada 1998 melahirkan perjalanan panjang yang pada akhirnya berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera di tahun 2002. Dalam setiap pemilihan umum yang diikuti, PK Sejahtera mampu meningkatkan perolehan suara secara signifikan, dimulai dari pemilu tahun 1999 ketika masih bernama PK hingga pemilu 2009 namun pada 2014 PK Sejahtera mengalami penurunan suara. Peranan PKS lembaga legislatif pun perlu dikaji secara mendalam mengingat banyaknya perwakilan dari partai PKS yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun alasan peneliti mengambil kurun waktu 1999 hingga 2014 karena untuk pertama kalinya Partai Keadilan mengikuti pemilu di tahun 1999 yang kemudian pada tahun 2002 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera, lalu PKS kembali mengikuti pemilu di tahun 2004, 2009, dan 2014. Serta peranan PKS dalam lembaga legislatif DPR pun akan dikaji dalam kurun waktu tersebut.

Dari uraian dan pemaparan diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul ***“POSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PANGGUNG PEMILIHAN UMUM DAN PERANANNYA DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DPR (1999-2014)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengemukakan permasalahan utama yakni “Bagaimana posisi PKS dalam panggung pemilihan umum dan peranannya dalam lembaga legislatif DPR (1999-2014)”. Permasalahan tersebut dijabarkan kembali ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi politik Indonesia pada kurun waktu 1970-1998?
2. Bagaimana sejarah lahirnya Partai Keadilan Sejahtera?
3. Bagaimana posisi PKS dalam pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014?
4. Bagaimana peranan PKS dalam lembaga legislatif DPR?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan situasi politik Indonesia pada kurun waktu 1970-1998.
2. Mendeskripsikan sejarah lahirnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
3. Mendeskripsikan posisi PKS dalam pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014.
4. Menganalisis peranan PKS dalam lembaga legislatif DPR.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengkaji pembahasan mengenai “POSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PANGGUNG PEMILIHAN UMUM DAN PERANANNYA DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DPR (1999-2014)” terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh peneliti, diantaranya :

1. Menambah khasanah penulisan karya ilmiah mengenai partai politik Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera.
2. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini dapat memperkaya literatur sejarah politik di Indonesia, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi.
3. Bagi satuan pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran sejarah pada masa reformasi khususnya sejarah partai politik Islam.